



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 5470-5482

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Penerapan PSAK 101,106 Dan Kaitannya Dalam Penyajian Pelaporan Keuangan Pada BPR Syariah Al Washliyah Krakatau

Veranika Butar-Butar^{1✉}, Mahyudin²

Politeknik Unggul LP3M Medan, Indonesia

Email : Vdamanik97@gmail.com^{1✉}

Abstrak

PSAK 101,106 merupakan standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman akuntan untuk mempermudah entitas syariah dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan yang mudah dipahami. Berdasarkan PSAK 101, 106 laporan keuangan yang lengkap terdiri dari delapan komponen, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyajian laporan keuangan BPR Syariah Al Washliyah Krakatau. Hasil dari penelitian dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian penyajian laporan keuangan di BPR Syariah Al Washliyah Krakatau belum sesuai dengan PSAK 101, 106 karena masih ada komponen yang belum disajikan. Dari laporan keuangan BPR Syariah Al Washliyah Krakatau hanya menyajikan laporan keuangan neraca, laporan laba rugi dan laporan zis. Hal ini disebabkan adanya faktor internal dan eksternal. Dengan penelitian ini diharapkan BPR Syariah Al Washliyah Krakatau melengkapi laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 101, 106.

Kata Kunci: *PSAK 101,106, Penyajian Laporan Keuangan*

Abstract

PSAK 101.106 is an accounting standard that is used as a guideline for accountants to make it easier for sharia entities to prepare and present financial reports that are easy to understand. Based on PSAK 101, 106 a complete financial report consists of eight components, namely financial position report, profit and loss report, change in equity report, cash flow report, income and profit sharing reconciliation report, source and distribution report of zakat funds, source and use of funds report. virtues, notes to financial reports. This research aims to analyze the presentation of the financial reports of BPR Syariah Al Washliyah Krakatau. The results of the research and discussion of this research show that some of the financial report presentations at BPR Syariah Al Washliyah Krakatau are not in accordance with PSAK 101, 106 because there are still components that have not been presented. From the financial reports of BPR Syariah Al Washliyah Krakatau, it only presents balance sheet financial reports, profit and loss reports and zis reports. This is due to internal and external factors. With this research, it is hoped that BPR Syariah Al Washliyah Krakatau will complete financial reports in accordance with PSAK 101, 106.

Keyword: *PSAK 101.106, Presentation of Financial Statements*

PENDAHULUAN

Pencatatan atau penulisan transaksi keuangan telah menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi sehari-hari di masyarakat, baik individu atau institusi menjadikan pencatatan keuangan sebagai bagian yang harus dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berguna dalam bisnis yang dijalankan. Kegiatan pencatatan tersebut menjadi dasar dari bentuk akuntansi (Jannah et al., 2023).

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan sarana untuk pengomunikasikan informasi keuangan utama kepada pihak dari luar perusahaan. Standar Akuntansi Syariah adalah Pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun non syariah (Apriana et al., 2019).

Ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yaitu nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran. Dalam akuntansi disaat melakukan transaksi dan terdapat perjanjian penuandaan sebaiknya harus ada bukti yang sudah tertulis. Jika tak ada yang akan menjadi saksi, juga tak ada bukti yang sudah dituliskan, maka diwajibkan harus ada jaminan. Dengan adanya jaminan tersebut bentuk dari suatu pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah (Secundo et al., 2020).

Prinsip dasar tersebut sejalan dengan tujuan laporan keuangan secara umum yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yaitu menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu (Al Shobaki et al., 2018).

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah. standar akuntansi keuangan syariah terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istisna. Standar ini merupakan standar yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK Syariah). Akuntansi Syariah diatur dalam PSAK 101 yang memuat mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian transaksi syariah dan PSAK 106 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah, tetapi tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah (Wahyuningsih & Mahdar, 2018)

BPR Syariah Al Washliyah Krakatau merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam ruang lingkup mikro. BPR Syariah Al Washliyah Krakatau mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BPR Syariah Al Washliyah Krakatau merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat Islam (Nida & Rosdiana, 2022). Dalam pelaporan keuangannya BPR Syariah Al Washliyah Krakatau belum sepenuhnya mengacu kepada penerapan PSAK 101,106. Padahal penerapan PSAK 101,106 merupakan keharusan pada Bank yang menganut pola syariah. Sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan laporan keuangan dengan lembaga keuangan syariah yang lain. Hal tersebut seringkali mengakibatkan ketidaksinkronan pelaporan keuangan ketika dilakukan verifikasi dan audit. Karena tim verifikasi dan audit memeriksa laporan keuangan berdasarkan ketentuan yang tertera pada PSAK 101,106.

Pada BPR Syariah Al Washliyah Krakatau, laporan keuangan dibuat dengan tujuan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas BPR Syariah Al Washliyah Krakatau yang bermanfaat bagi manajemen dalam rangka membuat perencanaan, pengukuran kinerja, dan sebagai acuan pengambilan keputusan strategis. Laporan keuangan juga disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan dana terhadap para anggota (Agustin & Rosdiana, 2022).

Untuk mempertanggung jawabkan aktivitas yang telah dilakukan, pihak BPR Syariah Al Washliyah Krakatau membuat laporan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang berlaku umum untuk mengukur kinerja sekaligus sebagai laporan kepada pihak terkait. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan, pengelolaan dan pemeriksaan dari transaksi finansial dalam suatu badan usaha yang dirancang untuk pembuatan keputusan baik dalam maupun luar perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan (Chaerunisa & Hapsari, 2018).

Salah satu tujuan laporan keuangan dari lembaga keuangan syariah adalah memberikan informasi yang lengkap kepada penggunanya dan sebagai laporan pertanggungjawaban fungsi yang telah dilaksanakan oleh entitas syariah. Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, pemilik dana qardh, pemilik dana investasi mudharabah, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infaq, sedekah dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Adapun penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh BPR Syariah Al Washliyah Krakatau pada tahun 2017-2018 sebagai berikut:

Berdasarkan terlihat laporan kas tidak dijabarkan secara lengkap apa saja komponen dari kas tersebut, tidak terlihat pos dan laba rugi pos pendapatan jasa. Pada piutang murabahah tidak ada pos kas pada bank. Tidak balance antara total aktiva lancar dan total aktiva tetap. BPR Syariah Al Washliyah Krakatau hanya membuat dua pos pada kewajiban yaitu kas dan tabungan mudharabah (Hofmann et al., 2018).

Berdasarkan data yang diperoleh dan ditampilkan pada tabel 1.1, dapat dilihat bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh BPR Syariah Al Washliyah Krakatau hanya berupa laporan naik dan turun, sedangkan menurut PSAK No. 101, 106 ada tujuh laporan keuangan yang harus dibuat, seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan (Anwar, 2019).

Fenomena bahwa laporan keuangan yang disusun oleh entitas tidak sepenuhnya berdasarkan standar dan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Jika laporan keuangan yang disusun tidak berdasarkan standar yang relevan bagi pengguna. Terlebih bahwa akuntansi syariah merupakan produk yang masih cukup baru bila dibandingkan dengan akuntansi konvensional. Dengan demikian pemahaman masyarakat

tentang akuntansi syariah masih minim jika dibandingkan dengan pemahaman mengenai akuntansi konvensional (Lesmana et al., 2019).

Berdasarkan uraian diatas akan dilakukan analisa terhadap penerapan PSAK 101,106 dan kaitannya dalam penyajian pelaporan keuangan pada BPR Syariah Al Washliyah Krakatau dalam skripsi dengan judul "Analisis Penerapan PSAK 101,106 dan Kaitannya Dalam Penyajian Pelaporan Keuangan Pada BPR Syariah Al Washliyah Krakatau".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian bersifat kualitatif Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Penulis melakukan penelitian pada BPR Syariah Al Washliyah Krakatau dengan cara menganalisis laporan keuangan BPR Syariah Al Washliyah Krakatau, apakah sesuai dengan laporan keuangan yang berdasarkan PSAK No.101, 106 (Zhafira & Syafruddin, 2023).

Penulis melakukan penelitian ini dimulai pada bulan Mei 2023. Tempat penulis meneliti adalah di BPR Syariah Al Washliyah Krakatau. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan data sekunder berupa laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (Sihombing & Michelle, 2018).

Untuk mendukung penelitian yang dilakukan, maka diperlukan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Untuk mendapatkan data-data tersebut, dipergunakan dua metode penelitian yaitu:

Metode Penelitian Kepustakaan (Library Reserch)

Penelitian ini dilakukan dengan membaca buku, tulisan ilmiah dan mengambil beberapa kutipan para ahli yang berhubungan dengan Skripsi penulis (Rahmawati & Retnani, 2019).

Metode Penelitian Lapangan

Dalam menggunakan metode ini, penulis mengumpulkan beberapa data dengan cara langsung ke perusahaan yang telah ditentukan untuk mengadakan penelitian. Penulis juga melakukan suatu teknik pengambilan data melalui: Pengumpulan data atau informasi dengan cara mengamati langsung terhadap objek penelitian yakni pada BPR Syariah Al Washliyah Krakatau. Penulis langsung berdialog pada responden untuk menggali informasi dari responden (Sugiyono, 2018).

Metode Analisis Data

Analisis yang dilakukan penulis adalah analisis deskriptif yaitu pengumpulan data, mengelompokkan data, mengolah data dan mengambil kesimpulan dari data tersebut.

Yang penulis lakukan membahas penerapan PSAK 101,106 dan kaitannya dalam penyajian pelaporan keuangan (Muaja et al., 2023).

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis sebagai berikut: Menganalisis Neraca BPR Syariah Al Washliyah Krakatau dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Membandingkan neraca yang disusun oleh BPR Syariah Al Washliyah Krakatau dengan neraca menurut PSAK No. 101, 106.
- 2) Menganalisis apakah neraca yang dibuat oleh BPR Syariah Al Washliyah Krakatau sudah sesuai dengan neraca yang diatur PSAK No.101, 106.
- 3) Jika neraca yang dibuat oleh BPR Syariah Al Washliyah Krakatau belum sesuai dengan PSAK No.101, 106 maka penulis menyesuaikan penyusunan neraca agar sesuai dengan PSAK No.101, 106.

Menganalisis Laporan laba rugi BPR Syariah Al Washliyah Krakatau dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Membandingkan laporan laba rugi yang disusun oleh BPR Syariah Al Washliyah Krakatau dengan laporan laba rugi menurut PSAK No. 101, 106.
- 2) Menganalisis apakah laporan laba rugi yang dibuat oleh BPR Syariah Al Washliyah Krakatau sudah sesuai dengan laporan laba rugi yang diatur PSAK No. 101, 106.
- 3) Jika laporan laba rugi yang dibuat oleh BPR Syariah Al Washliyah Krakatau belum sesuai dengan PSAK No.101, 106, maka penulis menyesuaikan penyusunan laba rugi agar sesuai dengan PSAK No. 101.

Penulis menyusun Laporan Keuangan yang tidak dibuat oleh BPR Syariah Al Washliyah Krakatau agar sesuai dengan PSAK No. 101, 106, laporan yang akan disusun sebagai berikut:

- 1) Laporan perubahan ekuitas
- 2) Laporan arus kas
- 3) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
- 4) Laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan
- 5) Catatan atas laporan keuangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT BPR Syariah Al-Washliyah didirikan dan beroperasi sejak tanggal 08 November 1994. Pada awalnya BPRS Al-Washliyah berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekan No.151A Tanjung Morawa. Peresmian dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara H. Raja Inal Siregar dengan menetapkan H. Suprpto sebagai direktur utama dan Ir. H.Muh. Arifin Kamdi, M.si,

H. Muslin Batu Bara, Khalifah Sitohang, Hidayatullah, S.E, dan H. Murat Hasyim sebagai komisaris (Nurliasari & Achmad, 2020).

Pada tanggal 02 April 2003, kantor PT. BPRS Al Washliyah telah berpindah di Jl. SM. Raja No. 51D Simpang Limun Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H. T. Rizal Nurdin. Sebagai direktur utama adalah Bapak Hidayatullah, SE dan sebagai komisaris adalah Bapak Ir. H.M. Arifin Kamdi, M.Si, serta Bapak Drs. H. Miftahuddin M.B.A.

Sejak saat itu, bank menjalankan operasinya berdasarkan syariat islam dengan menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung riba. Tahun 2013, bank memiliki gedung baru di Jl. G. Krakatau No. 28 Medan yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H. Gatot Pujo Nugroho pada tanggal 06 Januari 2014. Drs. H. Hasbullah Hadi, S.H. M.Kn, dan Drs. H. Miftahuddin M.B.A ditetapkan sebagai komisaris. Pihak Dewan Pengawas Syariah saat itu adalah Dr. H. Ramli Abd. Wahid. M.A. Dan yang menjabat sebagai direktur utama ialah H.R. Bambang Risbagio, S.E dan Tri Auri Yanti, S.E, M.E.I sebagai direktur operasional.



Gambar 1. Logo BPR Syariah Al Washliyah Krakatau

Dalam PSAK No. 101 menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (selanjutnya disebut PSAK 101) menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah.

PSAK 106 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah, tetapi tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah. Berdasarkan PSAK No. 106 dinyatakan bahwa

perlakuan akuntansi untuk musyarakah meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan. Pengakuan dan pengukuran investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non kas untuk usaha musyarakah. Adapun pengakuan dan pengukuran dalam pembiayaan musyarakah yaitu:

1. Pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan.
2. Pembiayaan musyarakah yang diberikan dalam bentuk aktiva non-kas
3. Dinilai sebesar nilai wajar aktiva non-kas.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh BPR Syariah Al Washliyah Krakatau dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 101, 106. Masih terdapatnya ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

Kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengurus dan pengelola terkait dengan laporan keuangan. Hal tersebut tersebut didukung oleh wawancara kepada Kadep Audit BPR Syariah Al Washliyah Krakatau.

"Kebanyakan aktivis itu latar belakangnya tidak ekonomi dia harus belajar dari nol. Gimana membuat laporan keuangan dari nol dan disesuaikan dengan keseharian kita" "Saya kira kurangnya pengetahuan tentang aturan PSAK, hal ini karena pengelolaan keuangan kita masih seerhana dalam arti belum mengikuti apa yang menjadi aturan di PSAK"

Dari wawancara tersebut, belum diketahui pencatatan aturan laporan seperti apa khususnya untuk PSAK Syariah 101, 106 ini. Dari pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa kurangnya informasi akuntansi yang didapat oleh pengelola BPR Syariah Al Washliyah Krakatau sehingga menyebabkan mereka hanya menggunakan metode yang sederhana saja. Tindakan ini sesuai dengan konsep perilaku yang dikemukakan Rogers yaitu sebelum orang mempunyai perilaku baru, didalam diri seseorang tersebut terjadi proses yang pertama yaitu kesadaran yaitu orang tersebut menyadari bahwa dalam arti mengetahui obyek terlebih dahulu, dalam hal ini informan belum mengetahui stimulus sehingga proses untuk berperilaku baru yaitu melakukan prnyajian keuangan sesuai PSAK 101, 106 belum biasa berjalan (Notoadmojo, 2019).

Dalam sebuah laporan keuangan syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu PSAK 101, 106, maka laporan keuangan tersebut akan lebih mudah untuk di bandingkan isinya dengan laporan konvensional. Laporan keuangan memiliki fungsi yang cukup penting, salah satunya adalah pengambilan keputusan, maka dari itu pengelola tentu wajib memahami tentang PSAK yang digunakan dalam entitas syariah (Lois et al., 2021).

"Untuk karyawan disini kebanyakan bukan dari lulusan ekonomi mbak, jadi kurangnya pemahaman untuk pembuatan laporan keuangan yang terlalu mendalam"

Dari wawancara di atas bahwa BPR Syariah Al Washliyah Krakatau tersebut hanya menyusun laporan berdasarkan kebutuhan saja. Tidak semua Laporan Keuangan disajikan baik. Hal ini yang menyebabkan bahwa BPR Syariah Al Washliyah Krakatau hanya membuat tiga laporan keuangan keuangan saja

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengetahuan dan pemahaman laporan keuangan dan komponennya pengelola BPR Syariah Al Washliyah Krakatau masih terbatas dan menyebabkan penyajian laporan keuangannya pun hanya menyajikan berdasarkan kebutuhan saja (Wijayanti & Prabowo, 2020).

Terbatasnya SDM yang dimiliki, sehingga BPR Syariah Al Washliyah Krakatau belum memiliki SDM yang memiliki pengetahuan yang memadai untuk melakukan pencatatan hingga penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 101, 106.

Laporan keuangan adalah suatu produk yang dihasilkan oleh bidang akuntansi, oleh karenanya di perlukan SDM yang kompeten dalam menyusun dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas di butuhkan SDM yang memahami dan berkompeten dalam melaksanakan akuntansi keuangan. Kemampuan SDM itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang berkualitas. Kompetensi SDM dapat dilihat dari latar belakang pendidikan pelatihan-pelatihan yang di ikuti.

Tidak adanya tenaga ahli dibidang akuntansi menjadikan pengelola BPR Syariah Al Washliyah Krakatau membuat laporan keuangan yang sederhana saja tanpa mengacu PSAK 101, 106. Selain itu pengelola BPR Syariah Al Washliyah Krakatau merasa bahwa laporan keuangan yang dibuat selama ini mudah dipahami dan ada pandangan bahwa kegiatan penyajian laporan keuangan dilakukan hanya untuk memenuhi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BPR Syariah Al Washliyah Krakatau kepada nasabah (Apriliyanti et al., 2019).

BPR Syariah Al Washliyah Krakatau sendiri masih memiliki keterbatasan dalam SDM, itu dapat dilihat dari observasi dan wawancara kepada pihak Kadep BPR Syariah Al Washliyah Krakatau.

Minimnya sosialisasi terkait standar penyajian laporan keuangan, terkait dengan PSAK. Sosialisasi yang diadakan biasanya bersifat secara umum tanpa membedakan antara syariah dan konvensional. Pelatihan yang dilakukan hanya berkisar pada operasional secara umumnya saja.

Melihat dari kenyataan yang ada kurangnya sosialisasi tentang keberadaan PSAK 101, 106 ini membuat BPR Syariah Al Washliyah Krakatau merasa asing terhadap standar yang di peruntukkan untuk yang berbasis syariah. adanya PSAK 101, 106 merupakan aturan yang baik

untuk para pengelola keuangan yang berbasis syariah membiasakan diri membuat laporan keuangan yang baik, sederhana dan mudah dipahami (Galbreath, 2017).

Mayoritas karyawan BPR Syariah Al Washliyah Krakatau tidak memiliki latar belakang ekonomi atau bahkan akuntansi syariah (Febriyanto, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu staf Account Officer BPR Syariah Al Washliyah Krakatau. "Kalau secara syariah belum begitu mendalam, soalnya belum ada yang mendalami. Kebanyakan karyawan dari kita yaitu lulusan dari luar jurusan ekonomi bahkan akuntansi syariah"

Tidak ada pelatihan khusus tentang penyajian keuangan berdasarkan PSAK 101, 106.

"Karena disini tidak ada pelatihan khusus terkait penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 10, 106, karena soal biaya, waktu juga mbak"

Dalam pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya pelatihan khusus PSAK 101, 106 terhadap penyajian laporan keuangan yang di buat oleh BPR Syariah Al Washliyah Krakatau. Karena dalam melaksanakan pelatihan di butuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit (Alfinur & Hidayat, 2021). Untuk waktu pelaksanaan pelatihan sendiri tidak memungkinkan kalau hanya di laksanakan dalam waktu sehari saja, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama agar dalam pelatihan bisa memahami betul bagaimana penyajian laporan keuangan terhadap PSAK 101, 106. Selain waktu, biaya juga menjadi faktor tidak dilaksanakannya pelatihan karena tentu saja dalam melaksanakan pelatihan di butuhkan biaya yang lumayan banyak (Haryati et al., 2021).

Adanya beberapa faktor diatas menyebabkan penyajian laporan keuangan BPR Syariah Al Washliyah Krakatau belum sesuai dengan PSAK 101, 106. Faktor-faktor tersebut berpengaruh salah satunya mengakibatkan BPR Syariah Al Washliyah Krakatau hanya menyajikan laporan keuangan berdasarkan pada kebutuhan saja. Tidak semua laporan keuangan disajikan. Secara garis besar, faktor- faktor tersebut berpengaruh terhadap pemahaman pengelola yang mengakibatkan terbatasnya laporan keuangan yang disajikan.

SIMPULAN

1. Laporan neraca yang dibuat oleh BPR Syariah Al Washliyah Krakatau sudah sesuai dengan PSAK 101, 106.
2. Laporan Laba Rugi yang di buat oleh BPR Syariah Al Washliyah Krakatau sudah sesuai dengan PSAK 101.
3. Laporan Arus kas yang di buat oleh BPR Syariah Al Washliyah Krakatau belum sesuai dengan PSAK 101, 106.

4. BPR Syariah Al Washliyah Krakatau menyajikan Laporan Sumber dan Penyaluran dana zakat tetapi dalam format laporannya tersebut masih digabung dengan Laporan Dana Kebajikan.
5. Penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101, 106 dikarenakan masih banyak komponen-komponen yang belum disajikan dalam laporan seperti Laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan BPR Syariah Al Washliyah Krakatau yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengurus terkait standar dalam penyajian laporan keuangan. Terbatasnya SDM, Kurangnya sosialisasi terkait PSAK Syariah, dan Kurangnya SDM yang memiliki pengetahuan terkait PSAK, dan belum terdapatnya wadah khusus yang membahas mengenai PSAK.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D. M., & Rosdiana, Y. (2022). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 83–90.
- Al Shobaki, M. J., Abu-Naser, S. S., Abu Amuna, Y. M., & El Talla, S. A. (2018). *The Entrepreneurial Creativity Reality among Palestinian Universities Students*. <https://doi.org/http://dstore.alazhar.edu.ps/xmlui/handle/123456789/312>
- Alfinur, A., & Hidayat, C. W. (2021). Firm Size, sales growth, profitability dan firm value pada sektor basic industry and chemical. *Management and Business Review*, 5(1), 85–92. <https://doi.org/10.21067/mbr.v5i1.5545>
- Anwar, M. (2019). Cost efficiency performance of Indonesian banks over the recovery period: A stochastic frontier analysis. *The Social Science Journal*, 56(3), 377–389. <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2018.08.002>
- Apriana, D., Kristiawan, M., & Wardiah, D. (2019). Headmaster's competency in preparing vocational school students for entrepreneurship. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(8), 1316–1330.
- Apriliyanti, V., Hermi, H., & Herawaty, V. (2019). Pengaruh Kebijakan Hutang, Kebijakan Deviden, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan dan Kesempatan Investasi terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 6(2), 201–224.
- Chaerunisa, S., & Hapsari, D. W. (2018). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016). *EProceedings of Management*, 5(3).

- Febriyanto, F. C. (2018). The effect of leverage, sales growth and liquidity to the firm value of real estate and property sector in Indonesia stock exchange. *Economics and Accounting Journal*, 1(3), 198–205.
- Galbreath, J. (2017). The Impact of Board Structure on Corporate Social Responsibility: A Temporal View. *Business Strategy and the Environment*, 26(3), 358–370. <https://doi.org/10.1002/bse.1922>
- Haryati, P. D. G., Rustiarini, N. W., & Dewi, N. P. S. (2021). Pengaruh corporate governance dan koneksi politik terhadap nilai perusahaan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Hofmann, H., Schleper, M. C., & Blome, C. (2018). Conflict Minerals and Supply Chain Due Diligence: An Exploratory Study of Multi-tier Supply Chains. *Journal of Business Ethics*, 147(1), 115–141. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2963-z>
- Jannah, M., Arintoko, & Rifda Naufalin, L. (2023). EFFECT OF THE METHOD OF EDUPRENEURSHIP PRACTICE-BASED BUSINESS CENTER AND SCHOOL ENVIRONMENT ON INTEREST IN ENTREPRENEURSHIP WITH ENTREPRENEURIAL MOTIVATION AS A MEDIATING VARIABLE. *International Journal of Entrepreneurial Knowledge*, 11(1), 51–71. <https://doi.org/10.37335/ijek.v11i1.185>
- Lesmana, B. E., Ilham, M., & Pitono, A. (2019). FORMULASI KEBIJAKAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (Studi Penyusunan APBD di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017). *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 11(4), 491–503. <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jv.v11i4.221>
- Lois, S., Suardi, H., & Sany, S. (2021). Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan. *Business Accounting Review*, 9(2), 213–226.
- Muaja, T., Kawulur, A., & Sumampouw, O. (2023). Pengaruh Likuiditas Dan Struktur Modal Terhadap Kualitas Laba Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2021. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1893–1906. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.517>
- Nida, R., & Rosdiana, Y. (2022). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2020. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 216–223. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1214>
- Nurliasari, K. E., & Achmad, T. (2020). PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Perusahaan

- Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(1).
- Rahmawati, H., & Retnani, E. D. (2019). Pengaruh Kebijakan Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(2).
- Secundo, G., Mele, G., Sansone, G., & Paolucci, E. (2020). Entrepreneurship Education Centres in universities: evidence and insights from Italian "Contamination Lab" cases. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 26(6), 1311–1333. <https://doi.org/10.1108/IJEER-12-2019-0687>
- Sihombing, T., & Michelle, S. (2018). Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurakunman (Jurnal Akuntansi Dan Manajemen)*, 2(2).
- Wahyuningsih, A., & Mahdar, N. M. (2018). Pengaruh size, leverage dan profitabilitas terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi*, 5(1), 27–36.
- Wijayanti, F. K., & Prabowo, T. J. W. (2020). Pengaruh Komite Audit dan Kualitas Audit Eksternal Terhadap Tindakan Manajemen Laba. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(1).
- Zhafira, D. R., & Syafruddin, M. (2023). PENGARUH PERAN KOMITE AUDIT DALAM MITIGASI MANAJEMEN LABA (Studi Empiris pada Perusahaan Industri yang Terdaftar di BEI 2012-2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2).